

Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP

MUKHAMAD MURDIONO

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, FIS UNY
mukhamad_murdiono@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan kejujuran dan kendala yang dihadapi guru untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Yogyakarta dengan subjek penelitian guru pendidikan kewarganegaraan dan siswa. Teknik analisis data menggunakan teknik induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru PKn dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam materi pembelajaran yang relevan. Kendala yang dihadapi oleh guru PKn antara lain terkait dengan permasalahan waktu dan kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat.

Kata Kunci: Antikorupsi, Pendidikan Kewarganegaraan, Kejujuran.

Abstract

This study aims to describe the efforts of Citizenship Education (CE) teachers to integrate anti-corruption education in CE teaching to instill honesty and constraints faced by teachers to integrate anti-corruption education in CE. Data were collected using interviews, observations, and documentations. Research was conducted at the State Junior High School 8 Yogyakarta involving teachers and students of CE as research subjects. Data were analyzed using inductive techniques. The results show that the efforts performed by CE teachers in the integration of anti-corruption education in CE include inserting the values of anti-corruption in the relevant learning materials. Meanwhile, the obstacles faced by CE teachers are issues related to time and the difficulty in selecting appropriate learning methods.

Keywords: Anti-Corruption, Education Citizenship, Honesty.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan akut bangsa Indonesia sejak merdeka, bahkan di masa penjajahan. Korupsi telah puluhan tahun mencengkeram bangsa Indonesia, dan sampai saat ini belum ada cara efektif untuk dapat lepas dari permasalahan korupsi. Korupsi kebanyakan terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, karena terkait dengan transisi pemerintahan dan status jajahan. Begitu kronisnya penyakit korupsi di Indonesia, mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi yang dilakukan secara sistemik dan melibatkan pelaku yang luas hanya dapat ditanggulangi dengan pendekatan yang komprehensif, strategis dan massif, baik struktural maupun kultural. Pendekatan struktural diarahkan pada penguatan isu-isu korupsi yang berkaitan dengan lembaga publik. Sementara pendekatan kultural diarahkan pada usaha

membangun kesadaran publik untuk memperkuat gerakan anti korupsi.

Pendekatan struktural telah dilakukan oleh badan pengawas yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dengan pendekatan yuridis dan advokasi. Sedangkan pendekatan kultural dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran penting untuk memperkuat gerakan anti korupsi, terutama melalui pembelajaran Kewarganegaraan. Penelitian mengenai pendidikan antikorupsi untuk menanamkan nilai kejujuran pada siswa SMP sangat penting dan perlu untuk dilakukan. Hal itu terkait dengan permasalahan korupsi yang terus menggerogoti bangsa Indonesia sampai saat ini. Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata korupsi juga dilakukan dengan modus operandi yang beragam. Korupsi

yang dilakukan semakin sulit untuk dideteksi dan diungkap karena dilakukan secara terencana dan sistematis.

Menurut Suradi (2006: 17) korupsi sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain mencakup: (1) penyuapan (*bribery*), (2) konflik kepentingan (*conflicts of interest*), (3) pemaksaan yang bersifat ekonomi (*economic extortion*), dan (4) pemberian secara tidak sah (*illegal gratuities*).

Korupsi sebagai penyakit kronis bangsa Indonesia dapat dijumpai baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal itu ditandai dengan berbagai bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan uang rakyat. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perilaku korup para aparatur penyelenggara negara memang belum terlihat optimal. Hal itu dikarenakan begitu kompleks dan rumitnya permasalahan korupsi yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan

secara parsial. Penyelesaian korupsi sebagai permasalahan krusial bangsa harus diselesaikan dengan menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan banyak pihak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah melalui pendekatan kultural. Sekolah merupakan lembaga kultural yang memiliki peran penting dalam upaya melakukan pendidikan anti korupsi.

Sekolah Menengah Pertama sebagai lembaga kultural formal dapat mengambil peran penting dalam melakukan pendidikan antikorupsi. Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), guru dapat mengembangkan pendidikan antikorupsi. Oleh karena itu, guru PKn perlu untuk mengembangkan disain pembelajaran yang dapat mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Kewarganegaraan untuk

menanamkan karakter kejujuran siswa.

Pengembangan karakter kejujuran menjadi salah satu bagian penting dalam pembelajaran PKn seiring dengan gencarnya program pemerintah tentang pendidikan karakter di sekolah. Banyak strategi dan program yang ditawarkan untuk mendukung keberhasilan pendidikan karakter yang diselenggarakan melalui lembaga sekolah. Pendidikan karakter bukan hanya sekadar program yang mengembangkan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotor. Wynne (1991); Kalidjernih (2011), menjelaskan bahwa karakter berhubungan dengan perilaku manusia yang positif. Dengan demikian karakter setiap manusia dapat diamati dalam aktivitasnya sehari-hari. Banyak tokoh yang mengemukakan pendapatnya dalam mendefinisikan pengertian karakter.

Sementara itu, kejujuran berasal dari kata dasar “jujur” yang dalam arti sempit dapat dimaknai sesuai uapannya lisan dengan kenyataan. Dalam pengertian yang lebih umum adalah sesuai lahir dan batin. Maka orang yang jujur adalah orang yang sesuai lahir dan batinnya (Mahmud, 2008: 1). Konsep dasar kejujuran akan tercermin dalam perilaku yang diikuti dengan hati yang lurus (ikhlas), berbicara sesuai dengan kenyataan, berbuat sesuai kebenaran. Berbicara sesuai kenyataan dan berbuat sesuai bukti dan kebenaran dapat dibuktikan dan dapat dilihat oleh mata. Tetapi berperilaku sesuai dengan kata hati yang lurus siapa yang tahu? Oleh karena itulah mental dan perilaku kejujuran perlu untuk dibentuk sejak usia sedini mungkin, salah satunya dengan cara pendidikan di sekolah. Pengembangan karakter kejujuran siswa di sekolah tidak dapat berhasil optimal tanpa dukungan lingkungan sosial.

Mengembangkan karakter kejujuran melalui pembelajaran kewarganegaraan diperlukan strategi yang tepat agar tujuan dapat dicapai optimal. Karakter kejujuran merupakan ranah afektif dalam pembelajaran, sehingga mengajarkannya tentu berbeda dengan ketika guru mengajarkan ranah kognitif. Menurut Osher dkk. (2010: 48), untuk menanamkan karakter kepada siswa dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan ekologi untuk manajemen kelas, kebijakan sekolah untuk mendukung perilaku positif, dan pembelajaran sosial dan emosional. Iklim kelas yang memungkinkan siswa untuk selalu berperilaku jujur sangat baik untuk mendukung keberhasilan internalisasi nilai karakter kejujuran. Wynne (1991: 139) menjelaskan bahwa pengembangan karakter lebih banyak didasarkan aktivitas kelas. Oleh karena itu penciptaan lingkungan kelas yang kondusif untuk pengembangan karakter

siswa perlu mendapat perhatian lebih.

Lingkungan sekolah yang kondusif untuk pengembangan karakter perlu memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) keadaan fisik sekolah yang menarik, (2) sekolah memiliki upaya untuk membangun, dan memelihara hubungan yang peduli, saling menghormati, mendukung, dan kolaboratif antara anggota staf sekolah, siswa, dan keluarga, (3) siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, (4) siswa menganggap aturan sebagai hal yang jelas, adil, dan tidak terlalu keras, (5) sekolah aman bagi siswa, keluarga, dan guru, (6) tersedia layanan belajar, (7) sekolah memiliki tingkat akademik dan perilaku yang tinggi dan memberikan dukungan untuk pencapaian tujuan, (8) memiliki upaya untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional semua siswa, (9) guru sebagai model dalam memelihara sikap, dan (10) memandang orang tua dan anggota masyarakat sebagai

sumber daya yang berharga, dan mereka didorong untuk terlibat aktif di sekolah (Dupper, 2010: 28).

Secara filosofis guru sebagai pendidik memiliki peran yang penting dalam perkembangan moral siswa. Menurut Nucci dan Narvaez (2008: 175), pendidik moral dan karakter memiliki peran utama dalam perkembangan moral siswa melalui "*hidden curriculum*" yang dimanifestasikan dalam lingkungan interpersonal sekolah dan ruang kelas. Kurikulum pendidikan karakter tidak harus secara eksplisit tertulis, tetapi dapat diinternalisasikan melalui kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Siswa akan mengembangkan konsepsi mereka tentang perilaku yang baik dengan mengamati perilaku yang dilakukan guru di dalam kelas, dan melalui pembiasaan-pembiasaan yang mereka lakukan di kelas.

Untuk mendukung keberhasilan pendidikan karakter kejujuran melalui pendekatan ekologis, guru diharapkan mampu

menciptakan ruang kelas yang kondusif untuk siswa berperilaku jujur. Misalnya, tidak mencontek ketika ulangan, berkata dan berperilaku sesuai hati nurani, mengakui kesalahan, dan lain-lain. Dreeben (Benninga, 1991: 3) menjelaskan bahwa sekolah, melalui pengaturan struktur dan pola perilaku guru, memberikan pengalaman tertentu bagi siswa yang sebagian besar pengalaman tersebut tidak ada dalam pengaturan sosial lainnya. Di samping perlu dukungan kondisi kelas yang kondusif, siswa juga perlu *role model* dari guru dalam berperilaku jujur. Menurut Brophy (Watson, 2008: 175) pengelolaan kelas merupakan kawasan pendidikan yang berfokus pada lingkungan kelas secara keseluruhan. Keberadaan guru di kelas tidak cukup hanya berfokus pada pengembangan kompetensi akademik siswa, tetapi juga memperhatikan suasana kelas yang mendukung siswa untuk berperilaku yang baik. Namun ada temuan yang mengecewakan

dimana pendidikan umum dalam masyarakat kehilangan minat dalam membelajarkan kebajikan moral. Keberhasilan pembelajaran dievaluasi berdasarkan ketercapaian bidang akademik.

Pada tataran pedagogis pendidikan karakter seperti yang kemukakan sebelumnya, bukanlah hal yang baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Telah lebih dari tujuh dasawarsa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia syarat dengan muatan pendidikan karakter, karena senantiasa memberikan bahan yang bertalian dengan pengembangan etika normatif guna mengembangkan warga negara yang baik atau *good citizen* (menjadi orang baik melalui hubungan dengan orang lain) dan warga negara nasional atau *national citizen* (menjadi anggota suatu negara yang baik) (Kalidjernih, 2011: 21). Untuk mencapai tujuan PKn perlu dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk model pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan daya nalar,

tanggung jawab, dan partisipasi siswa.

Model pembelajaran pendidikan karakter yang dapat dikembangkan di sekolah, salah satunya melalui model integrasi (terpadu) di dalam pembelajaran, yang dilakukan dengan pengenalan nilai-nilai, memfasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar semua mata pelajaran, termasuk PKn (Zubaedi, 2011: 268). Integrasi dalam proses pembelajaran ini dapat mengenai materi, pendekatan dan model pembelajaran, serta evaluasi yang dikembangkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru PKn dalam mendisain model pendidikan anti korupsi terintegrasi dalam pembelajaran kewarganegaraan untuk

membentuk karakter kejujuran siswa Sekolah Menengah Pertama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Termasuk jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini bermaksud menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa, yaitu pendidikan anti korupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk membentuk karakter kejujuran siswa SMP. Hal ini sejalan dengan pendapat Sanapiah Faisal (2001: 20), bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian dilakukan di SMP N 8 Kota Yogyakarta pada tahun 2015. Lokasi ini dipilih karena tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah. Selain itu

juga adanya dukungan positif dari kepala sekolah, guru, dan siswa yang ada di sekolah tersebut.

Subjek penelitian dipilih dengan *purposive*, yaitu guru PKn dan dan siswa. Guru Pendidikan Kewarganegaraan dengan mempertimbangkan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tugas atau kewajiban secara langsung menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn. Siswa merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam praktik pendidikan anti korupsi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Langkah-langkah analisis data meliputi: reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru memiliki kreativitas dalam mengembangkan rancangan pembelajaran antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran. Rancangan pembelajaran antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran secara jelas dapat dilacak dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Guru dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya memuat nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang didalamnya memuat nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PKn.

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam pembelajaran PKn untuk tingkat SMP/MTs di Kurikulum 2013 tidak ada topik yang secara langsung

membahas tentang korupsi. Namun demikian guru dapat mengembangkan atau menyisipkan pendidikan antikorupsi dalam rangka menanamkan nilai kejujuran kepada siswa SMP. Nilai-nilai yang disisipkan dapat dituliskan secara langsung dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden*) tidak dimasukkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal ini senada dengan pendapat Zubaedi (2011: 268) bahwa pendidikan karakter (kejujuran) dapat dilakukan melalui integrasi dalam pembelajaran. Caranya yakni dengan penginternalisasian nilai-nilai karakter ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar semua mata pelajaran. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan profesional guru untuk mengembangkan perencanaan

pembelajaran yang memuat nilai-nilai antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran yang dikembangkan di SMP N 8 Yogyakarta, yakni dengan memasukkan atau menyisipkan pada tema-tema tertentu. Misalnya, pada tema norma dan penegakan hukum, muatan materi pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan. Guru menyisipkan pendidikan antikorupsi pada materi yang memiliki keterkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Guru juga senantiasa memberikan nasihat kepada para siswa untuk senantiasa berbuat jujur. Kejujuran menjadi penting, karena kejujuran yang dibentuk sejak dini akan membentuk karakter siswa kelak ketika menjadi pemimpin dalam berbagai tingkatan atau level di masyarakat.

Penanaman karakter antikorupsi dalam pembelajaran PKn dilakukan juga secara tidak langsung atau sebagai nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden*).

Pendidikan karakter melalui cara yang tidak langsung atau tidak dimasukkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, sesuai dengan pandangan Nucci dan Narvaez (2008: 175) yang menyatakan bahwa guru sebagai pendidikan moral dan karakter memiliki peran utama dalam perkembangan moral siswa melalui "*hidden curriculum*" yang dimanifestasikan dalam lingkungan interpersonal sekolah dan ruang kelas. Dengan demikian, nilai-nilai karakter tidak harus secara langsung dimasukan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang tertulis, tetapi dapat juga diinternalisasikan melalui kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Melalui kegiatan atau aktivitas yang sengaja diciptakan oleh guru siswa akan mengembangkan konsepsi mereka tentang perilaku yang baik dengan cara mengamati perilaku yang dilakukan guru di kelas dan melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan siswa di kelas.

Guru juga menyiapkan materi khusus terkait dengan tema pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada tema pembelajaran PKn. Materi yang disiapkan untuk memantapkan pelaksanaan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran. Adanya materi yang telah disiapkan akan memudahkan guru dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran. Selain itu, guru dapat juga mengembangkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran terkait dengan pendidikan antikorupsi yang sudah direncanakan. Menurut Osher dkk. (2010: 48), untuk menanamkan karakter kepada siswa dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan ekologi untuk manajemen kelas, kebijakan sekolah untuk mendukung perilaku positif, dan pembelajaran sosial dan

emosional. Pengembangan berbagai metode pembelajaran kewarganegaraan yang tepat merupakan bagian dari pendekatan ekologi untuk manajemen kelas yang kondusif. Pendapat senada disampaikan Wynne (1991: 139) yang menjelaskan bahwa pengembangan karakter lebih banyak didasarkan aktivitas kelas. Oleh karena itu penciptaan lingkungan kelas yang kondusif oleh guru PPKn untuk pengembangan karakter kejujuran siswa perlu mendapat perhatian lebih.

Selain terdisain secara langsung dalam pembelajaran, sekolah juga memiliki program yang dikembangkan dalam rangka menanamkan karakter kejujuran siswa. Program yang dikembangkan antara lain: kantin kejujuran dan pengumuman melalui media audio tentang penemuan/kehilangan barang. Program kantin kejujuran telah berhasil meningkatkan karakter kejujuran siswa. Meskipun pada

masa awal berdiri, program kantin kejujuran pernah mengalami kerugian. Namun dengan kerja keras dari pihak sekolah untuk senantiasa mengingatkan kepada siswa untuk berbuat jujur, akhirnya program kantin kejujuran membuahkan hasil. Kantin mengalami peningkatan pendapatan secara terus menerus. Hal itu sebagai indikator bahwa siswa sudah mulai memiliki karakter kejujuran. Selain kantin kejujuran, ada juga pengumuman mengenai penemuan/kehilangan barang. Biasanya siswa yang menemukan sesuatu akan diserahkan kepada pihak sekolah melalui kantor Tata Usaha (TU), untuk selanjutnya pihak TU akan mengumumkan kepada seluruh warga sekolah melalui pengeras suara. Program ini juga membuahkan hasil, dibuktikan jika ada siswa yang kehilangan sesuatu akan mudah untuk kembali ditemukan.

Upaya yang dilakukan sekolah dalam menanamkan karakter kejujuran seperti telah

dikemukakan sebelumnya, senada dengan pendapat yang dikemukakan Dupper (2010: 28) bahwa lingkungan sekolah yang kondusif dapat mendukung terlaksananya pendidikan karakter. Lingkungan sekolah yang kondusif salah satunya dapat dilihat dari adanya upaya yang dilakukan sekolah untuk membangun dan memelihara hubungan yang peduli, saling menghormati, mendukung, dan kolaboratif antara staf sekolah, siswa, dan keluarga. Selain itu, sekolah sekolah memiliki tingkat akademik dan perilaku yang tinggi dan memberikan dukungan untuk pencapaian tujuan. Lingkungan sekolah yang kondusif dapat diciptakan melalui kerjasama dan sinergi dari semua *stakeholder* yang terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Guru dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan di kelas dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam pembelajaran PKn. Kemampuan

guru dalam memilih metode pembelajaran tergantung pada bagaimana kreativitas dan kepekaan guru terhadap kompetensi pembelajaran yang akan dicapai pada saat pembelajaran dilakukan. Metode pembelajaran memang tidak ada yang terbaik, artinya metode pembelajaran sangat tergantung dengan jenis materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Materi yang akan disampaikan oleh guru di kelas ada banyak ragamnya, seperti materi jenis konsep, prosedur, dalil, dan fakta. Untuk mencapai tujuan PKn perlu dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk metode pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan daya nalar, tanggung jawab, dan partisipasi siswa.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di lapangan, metode pembelajaran yang dipilih oleh guru dalam pembelajaran PKn yang mengintegrasikan pendidikan antikorupsi untuk menanamkan

karakter kejujuran yaitu model diskusi dan simulasi. Model diskusi melatih kemampuan siswa untuk berpikir dan menganalisis berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, metode diskusi dapat dipilih sebagai upaya untuk mengembangkan daya kritis siswa dan bagaimana mereka mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Metode diskusi yang diterapkan dalam pembelajaran PKn dipraktikkan dengan memberikan contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Para siswa biasanya akan terlihat antusias jika materi yang disampaikan merupakan materi yang aktual. Dari contoh-contoh kasus yang disajikan kemudian siswa menganalisis dan bekerjasama dengan teman kelompok untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

Selain metode diskusi, guru juga mengembangkan model pendidikan antikorupsi yang

terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran dengan menggunakan metode simulasi. Metode simulasi dilakukan dengan cara mempraktikkan atau memberikan solusi terhadap peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan sebagai bahan untuk menerapkan metode simulasi. Melalui metode simulasi para siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran PKn.

Pemilihan metode pembelajaran PKn yang tepat untuk menanamkan karakter kejujuran merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan kelas. Menurut Dreeben (Benninga, 1991: 3) menjelaskan bahwa sekolah, melalui pengaturan struktur dan pola perilaku guru, memberikan pengalaman tertentu bagi siswa yang sebagian besar pengalaman tersebut tidak ada dalam pengaturan sosial lainnya. Pendapat senada dikemukakan

Brophy (Watson, 2008: 175) bahwa pengelolaan kelas merupakan kawasan pendidikan yang berfokus pada lingkungan kelas secara keseluruhan. Guru dalam pembelajaran di kelas tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi intelektual siswa, tetapi perlu juga memperhatikan suasana kelas yang mendukung siswa untuk berperilaku baik. Meskipun pada kenyataannya masih sering dijumpai di kelas, guru yang hanya mengedepankan aspek akademik saja dan kurang memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan karakter siswa.

Dalam penerapan pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran kewarganegaraan untuk menanamkan karakter kejujuran di kelas, guru juga mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yang ditemui oleh guru biasanya terkait dengan kemampuan profesionalisme. Guru mengalami kesulitan untuk mengemas pembelajaran yang

tepat waktu. Artinya, guru seringkali mengalami permasalahan terkait waktu yang sesuai untuk pembelajaran PKn. Waktu yang terbatas untuk mengembangkan satu kompetensi dasar yang disisipi pendidikan antikorupsi menjadi minimnya ketercapaian tujuan pendidikan antikorupsi. Guru tidak dapat mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menguasai kompetensi dengan baik karena keterbatasan waktu.

Permasalahan yang lain, yaitu terkait kemampuan guru dalam menyisipkan tema pendidikan antikorupsi dalam topik pembelajaran PKn yang akan disampaikan. Topik khusus tentang upaya pemberantasan korupsi dalam Kurikulum 2013 memang tidak ada, oleh karena itu guru harus jeli dan memiliki kemampuan untuk menyisipkan dengan tepat ke dalam tema pembelajaran PKn yang akan disampaikan di kelas. Untuk menyisipkan tema pendidikan

antikorupsi dalam pembelajaran PKn diperlukan kemampuan dan keterampilan guru untuk mencermati setiap kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum.

Dalam menerapkan model pembelajaran pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn guru juga mengalami kendala dari sisi pelaksanaan metode pembelajaran yang dipilih. Metode simulasi yang diterapkan jika tanpa kontrol yang ketat dari guru, akan mengganggu aktivitas pembelajaran kelas lain. Dalam metode simulasi tentu guru akan mendisain kelas sedemikian rupa agar metode simulasi dapat diterapkan dengan baik. Siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran PKn jika guru menerapkan metode pembelajaran selain ceramah. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan metode pembelajaran baru yang lebih inovatif dan kreatif agar pembelajaran lebih menyenangkan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang sudah

ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Upaya yang dilakukan guru PKn untuk mengatasi kendala yang muncul antara lain: merancang pembelajaran agar sesuai dengan ketersediaan waktu yang telah direncanakan, melakukan kerjasama dan saling berdiskusi dengan guru PKn lain untuk menentukan kompetensi dasar yang dapat disisipi muatan pendidikan antikorupsi, dan mendisain metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan tetapi tidak mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas lain. Guru PKn juga berusaha mengembangkan materi tentang pendidikan antikorupsi secara mandiri. Guru melakukan kerjasama dengan cara mendatangkan perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada para guru dan siswa. Kehadiran KPK menambah semangat baru para guru untuk mengembangkan

pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn. Kerjasama seperti itu perlu untuk terus dilakukan agar upaya pendidikan antikorupsi terus berjalan di sekolah.

SIMPULAN

Pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran siswa yang dikembangkan guru PKn yaitu melalui pengembangan disain rencana pelaksanaan pembelajaran dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam materi pembelajaran yang relevan. Metode pembelajaran yang dipilih oleh guru yaitu melalui diskusi dan simulasi. Kendala yang dihadapi oleh guru PKn antara lain terkait dengan permasalahan waktu, sulitnya mencari materi yang relevan dengan pendidikan antikorupsi, dan pelaksanaan metode pembelajaran seringkali mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas lain. Upaya

yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul antara lain dilakukan dengan cara mendisain pembelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia, melakukan kerjasama dengan guru PKn lain agar tidak mengalami kesulitan dalam menyisipkan nilai pendidikan antikorupsi dalam materi pembelajaran PKn, dan mendisain ulang metode pembelajaran atau mencari metode pembelajaran alternatif agar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran kelas lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak SMP N 8 Kota Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dewan redaksi Jurnal Socia yang telah menerima dan melakukan *review* untuk penyempurnaan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

Bebeau, M.J., Rest, J.R., & Narvaez, D. 1999. Beyond the

promise: a perspective on research in moral education. *Educational Reasearcher*. 28 (18), hlm. 18-26.

Beninga, J. S., 1991. Moral and character education in the elementary school: in introduction. Benninga, J.S. (Penyunting). *Moral, character, and civic education in the elementary school*. New York: Teachers College, Columbia University.

Dupper, D. R. 2010. *A new model of school discipline engaging students and preventing behavior problems*. Oxford University Press: New York .

Kalidjernih, F.K. 2011. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Edisi kedua. Bandung: Widya Aksara Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Asa Mandiri.

_____. 2001. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak*

- Pidana Korupsi*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Nucci, L. P., & Narvaez, D. 2008. *Handbook of moral and character education*. New York: Routledge.
- Osher, D., dkk. 2010. How can we improve school discipline?. *Educational Researcher*, 39 (1), hlm. 48–58.
- Sanapiah Faisal. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suradi. 2006. *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*. Yogyakarta: Gava Media.
- Watson, M. 2008. Developmental discipline and moral education. Dalam Nucci, LP., & Narvaez, D. (Penyunting). *Handbook of moral and character*. New York: Routledge.
- Wibowo, A. 2012. *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wynne, E. A. 1991. Character and Academics in The Elementary School. Dalam Benninga J.S. (Penyunting). *Moral, character, and civic education in the elementary school*. New York: Teachers College, Columbia University.
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter; Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.